

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdullah, Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dwianto, Agus, 2003, *Reformasi dan Tata Pemerintahan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)*, UII Pers, Yogyakarta.
- Gafar, Jenedjri M, 2013, *Demokrasi Konstitusional*, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta.
- Halim, Hamzah dkk, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah* (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual), Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2014, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrati S., Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis Fungsi dan Muatan Materi)* Jilid 1, PT Kansius, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya)* jilid 2, PT Kansius, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensil Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Kaloh, J., 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marwah M. dkk, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Completet Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Munir, Sirojul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Perss, Yogyakarta.
- Pandoyo, S. Toto, 1981, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Leberty, Yogyakarta.
- Pedansa, Abdul Hasid dkk, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD*, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sholikin, M. Nur dkk, 2009, *Awasi Perda Berdayakan Daerah*, Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Una, Sayuti, 2004, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah, Menurut Konstitusi Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Artikel Suatu Jurnal

Sadu Wasistiono, 2010, “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, *Jurnal Ilmu Politik AIPI* Nomor 21 tahun 2010 dengan tema “Paradigma UU Nomor 22 Tahun 1999 Dalam Praktek”, Jakarta.

Sakinah Nadir, 2013, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa, Menuju Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Politik Profektik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013*, Makasar.

Hanif Nurcholis, 2001, “Hubungan Pusat dan Daerah: Anatara Efisiensi Adminstrasi dan Demokratisasi Lokal”, *Jurnal Forum Inovasi*, Jakarta.

D. Internet

<http://www.antarsultra.com/print/268918/pemprov-sultra-dimintai-ajukan-apbd-2014>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/perpu-pilkada-dan-pemda-disetujui-jadi-uu-dpr-usulkan-revisi>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia.

<http://jateng.tribunnews.com/2014/10/14/hakim-mk-sejak-keluar-perppu-otomatis-uu-no-22-tahun-2014-tidak-berlaku>.

<http://kbbi.web.id/produktivitas>.

<http://news.liputan6.com/read/2123687/mk-tolak-gugatan-uji-materi-uu-pilkada>.

<http://www.scribd.com/doc/16733299/Konsep-Produktivitas#scribd>.

<http://www.slideshare.net/adesuerani/laporan-balegda-atas-prolegda-sultra>.

E. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Arianto, S.H., M.Si Kasubdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah 1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2015.

Hasil wawancara dengan L.M. Taufan Alam, S.T. Ketua Komisi I dan anggota Balegda DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2015.

Hasil wawancara dengan Dr. Kamaruddin Jafar, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Juga Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kendari tanggal 8 April 2015.

Hasil wawancara dengan Sulasri Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2015.